



Kajian Kebutuhan Penelitian di Sektor Air Minum, Sanitasi dan Higiene (WASH)

Disampaikan dalam Webinar Seri II Sanitation and Water for All (SWA) dan Mutual Accountability Mechanism (MAM)

Nur Aisyah Nasution

DIREKTORAT PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS





SANITATION AND WATER FOR ALL (SWA) dan MEKANISME AKUNTABILITAS MUTUAL (MAM)









Sanitation and Water For All (SWA)



SWA adalah kemitraan global multistakeholders dari unsur pemerintah, donor, swasta, United Nations agencies, lembaga pendidikan tinggi dan riset, Civil Society Organizations (CSO), serta filantropi. 2

SWA merupakan platform global yang didirikan dalam rangka pelaksanaan mandat SDGs Tujuan 6: Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua, khususnya untuk pencapaian akses universal air minum, sanitasi, dan hygiene (Target 6.1 dan 6.2);

Fokus kemitraan SWA adalah untuk menginisiasi adanya dialog politik tingkat tinggi yang dipimpin oleh pemerintah sehingga terjadi proses pengambilan kebijakan yang kolaboratif dan melibatkan berbagai pihak mendapatkan prioritas tinggi dalam pembangunan negara baik dalam pendanaan, kelembagaan, dan tata kelola;

4

SWA telah menginisiasi penyelenggaraan pertemuan tingkat tinggi sejak tahun 2010 yang diselenggarakan setiap tahun secara bergantian di berbagai negara. Pertemuan rutin tersebut ditujukan untuk memberikan advokasi melalui dialog antar negara yang dilakukan melalui SMM dan FMM.

PERTEMUAN TINGKAT TINGGI SWA: FMM & SMM





FMM: Finance Ministers' Meeting

- Forum pertemuan antar Menteri Keuangan dunia untuk membangun dan meningkatkan peran, serta kerja sama Kementerian Keuangan dalam mengatasi gap pendanaan dan menciptakan investasi cerdas untuk mencapai akses universal air minum, sanitasi, dan hygiene.
- Pada tahun 2019, Indonesia telah menyampaikan komitmen dan country overview untuk Finance Ministers' Meeting (FMM) 2020.



SMM: Sector Ministers' Meeting

- •SMM adalah forum pertemuan **berbagai Menteri dunia yang menangani sektor air minum, sanitasi, dan hygiene.**Pelaksanaan SMM merupakan **peluang advokasi tingkat tinggi** untuk meningkatkan kepemimpinan politik di sektor WASH serta menjadi momen berbagi pengalaman bagi para menteri dalam **upaya menyelaraskan komitmen nasional**.
- SMM 2022 akan mengangkat tema "*Building Forward Better for Recovery and Resilience*" dengan Indonesia sebagai tuan rumah.

KETERLIBATAN DAN PERAN AKTIF INDONESIA DALAM SWA

Deputi Bidang
Pengembangan
Regional **hadir pada SMM 2019** di Costa
Rica, mewakili Menteri
PPN/Kepala Bappenas

2019

Indonesia
mempersiapkan
pelaksanaan SMM. Telah
dilaksanakan koordinasi
antara SWA dan
Menteri PPN/Kepala
Bappenas



START



50



2020







€ Private

HEAD OF BAPPENAS
MINISTER OF NATIONAL DEVELOPMENT PLANNING
INDONESIA
Suharso
Monoarfa



Bergabung dalam

SWA: Menteri PPN/Kepala Bappenas

2017

hadir dan berpartisipasi aktif dalam High Level Meeting - SMM dan FMM 2017 di

Washington D.C

Menteri PPN/Kepala Bappenas hadir dan menyampaikan closing remarks pada FMM 2020 yang diadakan secara virtual pada 3 regional yaitu Africa, America Latin, dan Asia-Pasifik.

Output dari SMM 2019 untuk Indonesia ialah:

- Penentuan Indonesia sebagai Host SMM 2022
- Dukungan SWA dalam memperkuat political will dalam mendukung WASH dan pencapaian ODF sebagai prioritas nasional
- Mekanisme Akuntabilitas Mutual (MAM)



Apa itu Mekanisme Akuntabilitas Mutual (MAM)?



1

Proses dimana pemangku kepentingan dapat dimintai pertanggungjawaban oleh satu sama lain atas komitmen yang dibuat. 2

Bertujuan untuk
mencapai tujuan
bersama dan dilakukan
de ngan membangun
kepercayaan,
kesepahaman, serta
kolaborasi antara para
pemangku kepentingan.

3

Dalam konteks SWA, akuntabilitas mutual merupakan proses dimana para mitra secara bersama membangun sistem akuntabilitas yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis dan terdapat timeline yang jelas (time-bound actions).



Mekanisme bagi pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama **membuat komitmen dalam mencapai target SDG 6.**

Pemerintah dan para pemangku kepentingan berkolaborasi dalam menentukan komitmen MAM nasional.

PERAN LEMBAGA RISET DALAM PEMBANGUNAN AIR MINUM, SANITASI DAN HYGIENE (WASH)









SMM Berbagai Isu yang Dapat Disasar Melalui **Penelitian**



Pengembangan sektor air minum dan sanitasi memerlukan dukungan dari multi sektor dan multi disiplin. Kegiatan riset merupakan tools yang dapat digunakan untuk menjawab berbagai isu dan tantangan layanan WASH

ASPEK PENDANAAN

- Peningkatan pendanaan publik dan non publik untuk sektor air minum dan sanitasi:
- Pengembangan costing tools untuk akses air minum dan sanitasi aman, serta akses terhadap higienitas;

ASPEK PEMANTAUAN

- Identifikasi data untuk pengembangan sektor WASH di area publik, seperti di sekolah, fasilitas kesehatan dan tempat kerja;
- Pengembangan sistem pemantauan untuk menilai akses air minum dan sanitasi aman, serta akses terhadap higienitas, baik di rumah tangga dan non rumah tangga;
- Pengembangan layanan publik untuk sektor air minum dan sanitasi aman;

KESIAPSIAGAAN TERHADAP PERUBAHAN IKLIM

- Insiatif untuk pembangunan infrastruktur WASH berketahanan dan ramah iklim;
- Perubahan perilaku masyarakat untuk mendukung WASH yang ramah iklim;
- Pengembangan teknologi air minum dan sanitasi yang ramah iklim.

ASPEK KEMITRAAN

- Identifikasi model kemitraan dan peran dari berbagai pemangku kepentingan sektor WASH:
- Potensi keterlibatan sektor non pemerintah dalam pengembangan sektor WASH.

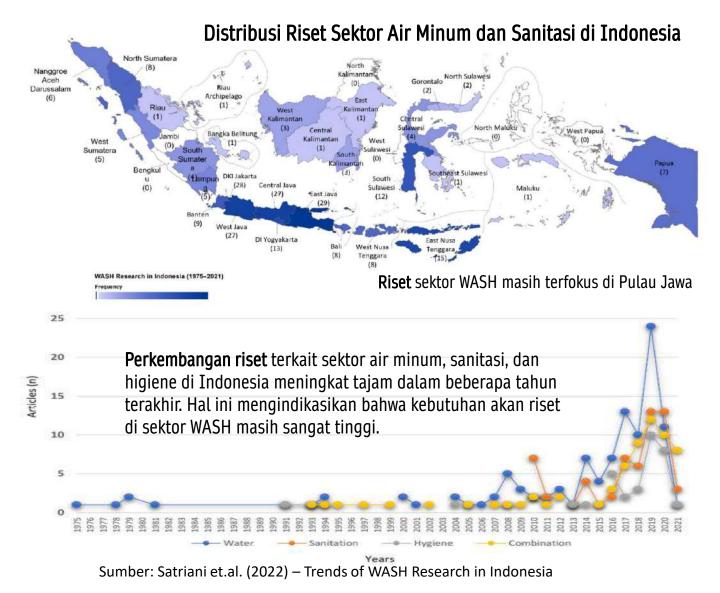




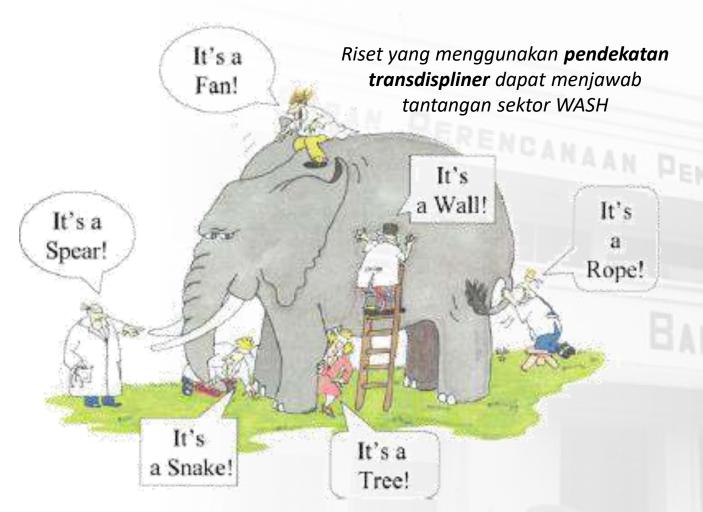
Mengapa Riset Diperlukan?



- ☐ Riset terkait WASH sangat penting untuk mendukung percepatan pencapaian SDG 6.1 dan 6.2.:
- ☐ Riset dapat digunakan untuk meninjau secara kritis dan memantau kemajuan saat ini, mengembangkan kebijakan berbasis bukti, atau menemukan penyebab terkait isu dan tantangan sektor WASH;
- ☐ Riset diperlukan untuk memberikan gambaran tentang situasi lokal, misalnya tantangan atau masalah sektor WASH di suatu kabupaten atau tingkat provinsi, dan memberikan rekomendasi untuk memecahkan masalah tersebut. Keunikan kondisi lokal menjadi latar belakang mengapa riset diperlukan di berbagai tingkatan daerah.
- ☐ Perlu melibatkan berbagai disiplin ilmu untuk menjawab beberapa tantangan potensial di sektor WASH.



Riset Transdisipliner Untuk Sektor WASH



Riset transdisipliner mengartikulasikan berbagai bentuk pengetahuan; menjawab berbagai tantangan WASH yang ada



Purposif

 Riset transdisipliner diperlukan untuk menjawab tujuan khusus

Holistik

 Memasukkan seluruh sistem aspek layanan WASH dan berbagai dimensi waktu

Partisipatori

 Melibatkan berbagai pihak, berbagai disiplin, menyatukan berbagai perspektif (pemerintah dan akademisi) untuk menuju satu visi penyediaan layanan WASH

• Inovatif dan Eksperimental

 Menguji ide melalui intervensi dan tindakan nyata

Dinamis

 Rencana penelitian yang transdisipliner menyesuaikan dengan mengubah konteks dan pengetahuan baru

Pentingnya Meningkatkan Kualitas SDM di Sektor WASH melalui Lembaga Pendidikan

ISU- ISU YANG PERLU DIPERHATIKAN (1):

- 1. Definisi dan klasifikasi sektor WASH tidak tersedia secara formal, sehingga menyulitkan proses analisis terkait peluang kerja yang lebih sistematis dan akurat
- 2. Peta Okupasi (occupation map) dibutuhkan sebagai dasar dalam peningkatan kapasitas para pekerja di sektor WASH
- 3. Pertukaran informasi pada sisi demand dan supply (Govt, swasta, akademisi, dll) belum dapat dilaksanakan dengan baik karena masih menjadi hal yang belum dipahami secara umum
- 4. Permintaan terhadap pelatihan dan pendidikan vokasi sangat tinggi namun belum banyak pihak yang menyediakannya, terutama untuk WASH
- 5. Belum ada pelatihan yang mengacu pada SKKNI, termasuk yang diselenggarakan oleh pemerintah





- 1. Dari total 1.128 daftar perguruan vokasi di Indonesia, hanya ada 1 (satu) perguruan vokasi untuk air minum
- 2. Terdapat 68 Perguruan Tinggi (PT) yang memiliki program studi Teknik Lingkungan, namun belum ada PT yang secara khusus memberikan pelatihan berbasis kompetensi untuk penyelenggara air minum dan sanitasi



Sumber: UNICEF Indonesia dan IUWASH-PLUS-SECO, 2021





(INITIAL ASSESSMENT) KEBUTUHAN TENAGA KERJA UNTUK SEKTOR AIR MINUM DAN SANITASI



308.099

Orang

△ Air minum dan Sanitasi

Perkiraan total kebutuhan lulusan untuk SDM penyelenggaraan layanan air minum dan sanitasi hingga tahun 2024

Prioritas Nasional	Bidang/Program Studi Terkait	Kebutuhan Lulusan (orang)	Lokasi
PN 5 "Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan	Program studi terkait penyusunan master plan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	23.947	Seluruh kab/kota
Ekonomi dan Pelayanan	Program studi terkait konstruksi SPAM	1.686	Seluruh kab/kota
Dasar"	Program studi terkait operasional teknis dan non-teknis sistem layanan air minum	60.784	Seluruh kab/kota
	Program studi terkait perencanaan sektor sanitasi, termasuk perencanaan teknis serta kebutuhan untuk advokasi dan promosi	8.294	Seluruh kab/kota
	Program studi terkait konstruksi sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) terpusat dan setempat	81429	Seluruh kab/kota
	Program studi terkait operasional teknis layanan sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) terpusat	6.194	119 kab/kota
	Program studi terkait operasional teknis layanan sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) setempat mulai dari sub-sistem pengangkutan hingga sub-sistem pengolahan lumpur tinja	125.765	374 kab/kota
	Total	308.099	

DRAFT KOMITMEN INDONESIA









DRAFT KOMITMEN DALAM MAM





Meningkatkan komitmen politik dan investasi untuk mempercepat peningkatan WASH di Indonesia

Enhance political commitment and investments to accelerate scaling up inclusive WASH in Indonesia Memperkuat
pemantauan dan
pelaporan yang
didorong oleh
kesetaraan dan
keterlibatan
masyarakat

Strengthen equity driven monitoring and reporting and citizen's engagement

Mengembangkan investasi dan infrastruktur sektor WASH yang berketahanan iklim

Developing climate-resilient WASH sector investment and infrastructure Memperluas kemitraan dan memobilisasi pembiayaan alternatif untuk meningkatkan layanan WASH

Expand partnerships and mobilize alternative financing to scale up WASH services



Meningkatkan komitmen politik dan investasi untuk mempercepat peningkatan WASH di Indonesia





Sub-komitmen		Milestone (2022)	Target (2023)	Target 2030
Sub-komitmen 1: Pengesahan Roadmap Air Minum Aman, Sanitasi Aman, Stop BABS, dan CTPS oleh Pokja PPAS Nasional	1.	Finalisasi Roadmap Air Minum Aman, Sanitasi Aman, Stop BABS, dan CTPS Sosialisasi dan advokasi Roadmap Air Minum Aman, Sanitasi Aman, Stop BABS, dan CTPS bagi Pemda dan stakeholders lainnya	·	dan hygiene ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah
Sub-komitmen 2: Peningkatan alokasi	1.		Renja K/L 2024, RPJMN 2025-2029 dan Renstra Kemenkes 2025-2029 (Kementerian Kesehatan)	
pendanaan untuk air minum aman, sanitasi aman, dan hygiene	2.	untuk meningkatkan pendanaan Advokasi dan koordinasi Pokja PPAS Nasional dan Daerah	K/L terkait (Bappenas dan KL terkait) b. Alokasi pendanaan untuk air minum dan sanitasi aman serta hygiene dalam APBD (Kemendagri dan pemerintah daerah)	minum aman, sanitasi aman, dan hygiene b. 100% Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota
	3.	Penyiapan costing tools untuk akses air minum aman, sanitasi aman dan hygiene	c. Air minum, sanitasi dan hygiene menjadi prioritas dan menu seluruh Dana Transfer (DAK, DAU, Dana Desa, DID, dll)	mengalokasikan pendanaan air minum dan sanitasi aman dalam APBD, termasuk untuk pemantauan dan evaluasi



Meningkatkan komitmen politik dan investasi untuk mempercepat peningkatan WASH di Indonesia





Sub-komitmen	Milestone (2022)	Target (2023)	Target 2030
Sub-komitmen 3: Penguatan Mekanisme Koordinasi untuk WASH dalam Kedaruratan, WASH di sekolah, WASH di fasilitas kesehatan, dan WASH di	Dimulainya penyusunan kerangka WASH di sekolah, WASH fasilitas kesehatan dan WASH di tempat kerja	a. Identifikasi stakeholder terkait yang mendukung WASH di sekolah, WASH di fasilitas kesehatan, dan WASH di tempat kerja	1. Terinternalisasikannya target dan capaian WASH non rumah tangga (Sekolah, Fasilitas Kesehatan dan Tempat Kerja) dalam dokumen perencanaan dan penganggaran nasional (RPJMN dan Restra K/L)
tempat kerja dan WASH.		b. Identifikasi data dasar yang mendukung WASH di sekolah, WASH di fasilitas kesehatan, dan WASH di tempat kerja	2. Adanya kebijakan nasional untuk WASH di Sekolah, Fasilitas Kesehatan, dan Tempat Kerja
		c. Framework atau kebijakan pendukung untuk WASH di sekolah, fasilitas kesehatan, tempat kerja, dan kebencanaan	
Sub-komitmen 4: Masterplan Nasional		Penyusunan masterplan air minum dan sanitasi nasional	Seluruh provinsi dan kab/kota memiliki masterplan air minum dan sanitasi aman yang diupate secara berkala



Memperkuat pemantauan dan pelaporan yang didorong oleh kesetaraan dan keterlibatan masyarakat





		Sub-komitmen	Milestone (2022)	Target (2023)	Target 2030
	Peran Riset	Sub-komitmen 1: Satu platform pemantauan pencapaian SDG-6	Disahkannya Platform Database SDGs Tujuan 6 Target 6.1 dan 6.2 beserta pihak yang bertanggung jawab (focal point) untuk setiap penyediaan data indikator	a) Pengesahan dan pembaharuan data dasar indikator SDGs 6.1 dan 6.2 setiap tahun oleh pihak-pihak yang ditunjuk;	(time series) untuk indikator
				b) Terinternalisasikannya aspek kesetaraan (gender, disabilitas, desil pendapatan, dll) dalam Indikator WASH	kesetaraan dalam WASH
	Peran Riset	tools pemantauan untuk menilai akses air minum	a. Terintegrasinya inspeksi sanitasi setempat dalam sistem monitoring STBM, surveilans kualitas air minum dan EHRA (environmental health risk assessment) di tingkat lokal (Kab/Kota) b. Website STBM berjalan optimal c. PAM-RT berjalan optimal d. Dimulainya surveilans kualitas air minum		Terbentuknya platform pemantauan dan pelaporan yang terpantau secara rutin
	Peran Riset	Sub-komitmen 3: Mengembangkan tools pemantauan untuk menilai kualitas WASH non-rumah tangga	Optimalisasi Platform yang sudah tersedia yaitu Dashboard SDGs untuk integrasi tools pemantauan dan pelaporan sektor WASH non rumah tangga	sudah tersedia ke dalam	Tersedia dan terintegrasinya data berkala dalam target dan capaian WASH non rumah tangga (Sekolah, Fasilitas Kesehatan dan Tempat Kerja)

Memperkuat pemantauan dan pelaporan yang didorong oleh kesetaraan dan keterlibatan masyarakat





Sub-komitmen	Milestone (2022)	Target (2023)	Target 2030
Sub-komitmen 4: Adanya mekanisme pelaporan layanan publik untuk sektor WASH	1. Penyusunan pedoman bagi Pemda untuk memanfaatkan platform layanan publik eksisting untuk menampung masukan dan saran terkait layanan sektor	1. Pedoman bagi Pemda untuk memanfaatkan dan mengembangkan platform layanan publik untuk sektor WASH (menggunakan SP4N Lapor!)	 Seluruh daerah memiliki mekanisme pelaporan untuk layanan public Seluruh daerah menangani
	WASH 2. Koordinasi dengan Kementerian PAN-RB untuk pengembangan mekanisme	2. Pemanfaatan media siar dan/atau media elektronik milik Pemda untuk mendorong pelaporan layanan publik terkait dengan sektor WASH	dan menindaklanjuti setiap pelaporan yang masuk terkait sektor WASH
	pelaporan layanan publik melalui SP4N Lapor!	3. 50% Pemerintah Daerah mulai menerapkan pelaporan layanan publik terkait dengan sektor WASH melalui SP4N Lapor!	
Sub-komitmen 5: Terbentuknya civic engagement di seluruh	a. Penyusunan pedoman pendirian dan kerangka penguatan forum pelanggan dan forum WASH	a. Pedoman untuk pendirian dan kerangka penguatan forum pelanggan dan forum WASH sebagai mekanisme pelibatan masyarakat	Seluruh daerah memiliki forum pelanggan WASH yang optimal dengan penerapan kerangka
lembaga layanan air minum dan air limbah domestik	b. Penyusunan mekanisme komunikasi forum pelanggan dan forum WASH	b. Mekanisme komunikasi forum pelanggan dan forum WASH	penguatan yang telah disusun
	c. Adanya forum WASH	c. Meningkatnya jumlah daerah yang memiliki forum pelanggan dan forum WASH sebagai mekanisme pelibatan masyarakat menjadi Kab/kota	
		d% daerah melaksanakan pilot project terhadap forum pelanggan dan forum WASH yang menerapkan kerangka penguatan forum pelanggan dan forum WASH	



Peran Riset

Mengembangkan investasi dan infrastruktur sektor WASH yang berketahanan iklim





Sub-komitmen	Milestone (2022)	Target (2023)	Target 2030
Sub-komitmen 1: Penyusunan kerangka pedoman untuk mengarusutamakan sektor	Tersusunnya pedoman untuk mengarusutamakan ketahanan iklim ke dalam kebijakan, rencana, dan investasi	a. Terdapat kerangka kerja pengarusutamaan ketahanan iklim	a. 100% provinsi dan kab/kota telah mengintegrasikan
WASH ke dalam kebijakan dan peraturan terkait ketahanan iklim di tingkat nasional, provinsi, dan kab/kota	di tingkat nasional, provinsi, dan kab/kota	b. Dimulainya inisiasi untuk mengintegrasikan aspek ketahanan iklim dalam dokumen kajian dan perencanaan sektor WASH di provinsi dan kab/kota	
Sub-komitmen 2: Pencatatan dan Pemantauan Kontribusi sektor WASH terhadap adaptasi dan mitigasi nasional sebagai bagian dari Komitmen NDCs (Nationally Determined Contribution)	berketahanan iklim b. Teridentifikasinya kontribusi WASH	a) Terdapatnya kegiatan WASH yang berasal dari pendanaan dari upaya adaptasi dan mitigasi nasional; b) Adanya baseline untuk investasi pembangunan WASH berketahanan iklim; c) Terdapat indikator untuk memantau penurunan jejak karbon melalui pembangunan WASH d) Sistem pemantauan WASH teringtegrasi dengan sistem pemantauan perubahan iklim (KLHK) e) Integrasi pendekatan, perencanaan dan program WASH dengan sektor perubahan iklim	b. Kontribusi sektor WASH dalam mengurangi jejak karbon dan emisi GRK dicatat dan dipantau sebagai bagian dari NDC Indonesia



Peran Riset

Mengembangkan investasi dan infrastruktur sektor WASH yang berketahanan iklim





Sub-komitmen		Milestone (2022)	Target (2023)		Target 2030
Sub-komitmen 3: Pengembangan perilaku dan teknologi WASH yang ramah iklim	a.	program pengamanan air	a. Studi untuk mendukung perilaku ramah iklim, termasuk hemat air	a.	Seluruh penyelenggara SPAM mulai menerapkan teknologi pemanfaatan air yang ramah iklim
	b.	Dikembangkannya pedoman pengelolaan air minum dan air limbah di		b.	Adanya pemicuan yang berkelanjutan kepada masyarakat mengenai
			c. Perilaku pemanfaatan air yang ramah iklim		perilaku pemanfaatan air yang ramah iklim, termasuk perilaku hemat air
	C.	Perluasan pembangunan	d. Inventarisasi teknologi air minum dan sanitasi yang ramah iklim	C.	100% PDAM telah menerapkan RPAM yang mengarusutamakan konsep
			e. Penerapan konsep RPAM di penyelenggara SPAM yang berketahanan iklim		berketahanan iklim
			f. Pembangunan sumur resapan di tiap desa/kelurahan		



Memperluas kemitraan dan memobilisasi pembiayaan alternatif untuk meningkatkan layanan WASH

Sub-komitmen	Milestone (2022)	Target (2023)	Target 2030
Sub-komitmen 1: Pemetaan keterlibatan sektor non-pemerintah dalam WASH	_	lembaga non pemerintah (CSO, lembaga riset, bisnis, filantropi, dll)	100% Provinsi telah mendapatkan dukungan pembangunan WASH dari berbagai kelompok konstituen non pemerintah
Sub-komitmen 2: Penguatan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan di sektor WASH	non pemerintah (CSO, lembaga riset, bisnis, filantropi, dll) untuk	Meningkatnya peran lembaga non pemerintah dalam pembangunan WASH di tingkat nasional dan daerah, baik dalam bantuan teknis maupun investasi (CSO, lembaga riset, bisnis, filantropi, dll)	
Sub-komitmen 3: Peningkatan pembiayaan alternatif untuk sektor WASH	tentang pembiayaan alternatif untuk air minum dan sanitasi (mikro kredit rumah tangga) 2. Model pilot untuk mikro kredit KPSPAMS	 a) Disahkannya regulasi dan kebijakan khusus untuk MK rumah tangga b) Disahkannya regulasi dan kebijakan untuk MK KPSPAMS (merupakan bagian dari KUR) c) Adanya inisiasi kerja sama dengan LAZ Swasta d) Adanya Panduan CSR dan Filantropi 	
		e) Satu mekanisme pendanaan baru untuk air minum dan sanitasi (blended finance, sukuk, dana iklim)	

Peran Riset

Peran Riset

Peran Riset

Peran Lembaga Riset dalam MAM





Mendiskusikan status dan kemajuan pencapaian SDGs

Berbagi informasi dan pembelajaran serta berkolaborasi untuk advokasi bersama dengan organisasi masyarakat

Bersama CSO melaksanakan konsultasi pra-anggaran, yang sekaligus menjadi ajang menyuarakan kebutuhan di tingkat akar rumput, serta memberikan masukan pada Rencana Pembangunan Nasional sektor WASH

Mengembangkan sistem pemantauan melalui learning events bersama institusi riset dan pemerintah negara lain

Pelatihan dan penelitian yang sustain melibatkan lembaga riset akan meningkatkan akan semakin meningkatkan penerimaan evidence di tingkat masyarakat dan menjadi masukan bagi pemerintah



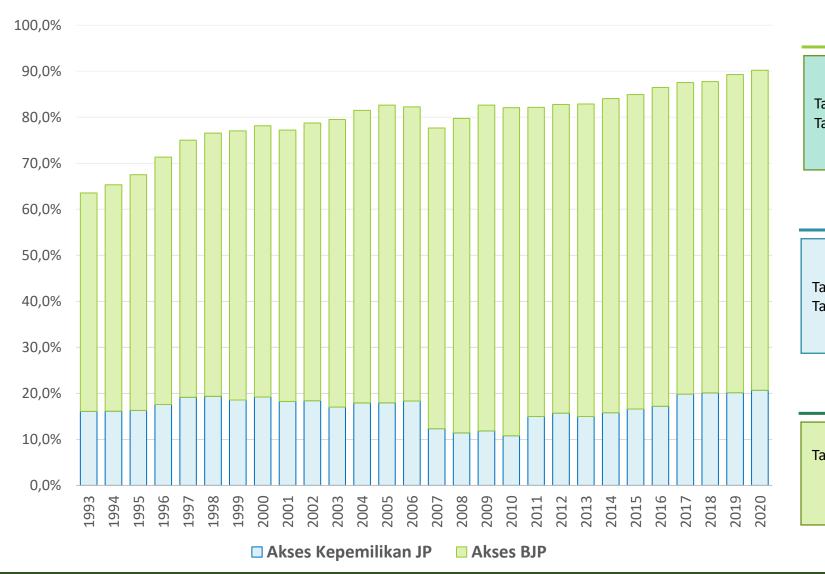
KONDISI AIR MINUM DAN SANITASI







AKSES AIR MINUM NASIONAL 1993 - 2020



Akses Air Minum Layak

Tahun 1993: 63,6%
Tahun 2020: 90,2%

Meningkat 26,7%
dalam 30 tahun

Rata-rata
peningkatan
tahunan
sebesar 0,95%

Akses Jaringan Perpipaan

Tahun 1993: 16,1%
Tahun 2020: 20,7%

Meningkat 4,6%
dalam 30 tahun

Rata-rata
peningkatan
tahunan
sebesar 0,16%

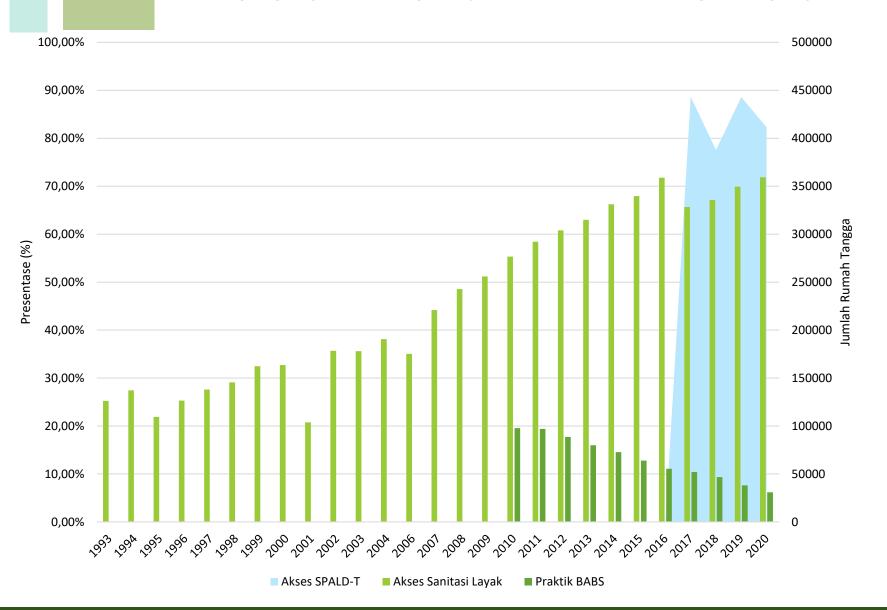
Akses Bukan Jaringan Perpipaan

Tahun 1993: 47,5%
Tahun 2020:
69,5%

Meningkat 22,1%
dalam 30 tahun

Rata-rata
peningkatan
tahunan
sebesar 0,79%

AKSES SANITASI & PRAKTIK BABS NASIONAL 1993 - 2020



Akses Sanitasi Layak

Tahun 1993: 25,23%
Tahun 2020: 79,53%

Meningkat 54,30% dalam kurun waktu 28 tahun

Rata-rata peningkatan tahunan sebesar 1,94%

Praktik BABS di tempat terbuka

Tahun 2010: 19,56% Tahun 2020: 6,19%

Menurun 13,37% dalam kurun waktu 10 tahun

Rata-rata penurunan tahunan sebesar 1,22%

Akses terhadap SPALD-T

Tahun 2016: 19,56% Tahun 2020: 6,19%

Menurun 13,37% dalam kurun waktu 10 tahun

Rata-rata penurunan tahunan sebesar 1,22%



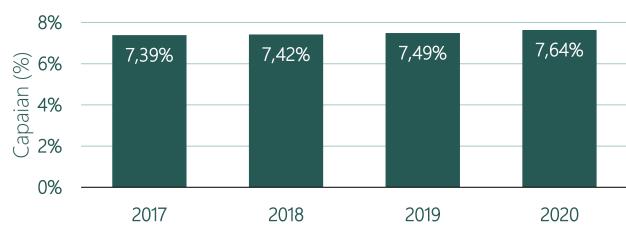
AKSES SANITASI AMAN



26

Peningkatan akses sanitasi aman rata-rata sebesar **0,08%** per tahun (2017-2020)

Tren Akses Sanitasi Aman di Indonesia



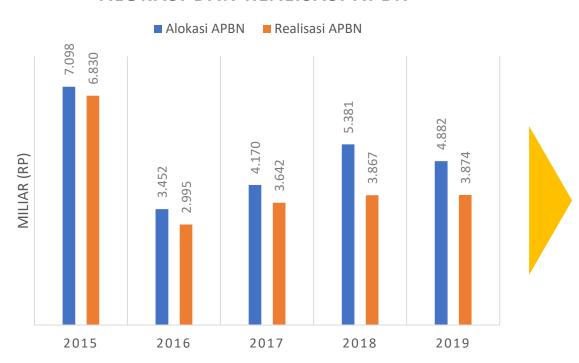
Akses Sanitasi Aman Perkotaan dan Perdesaan pada 2020



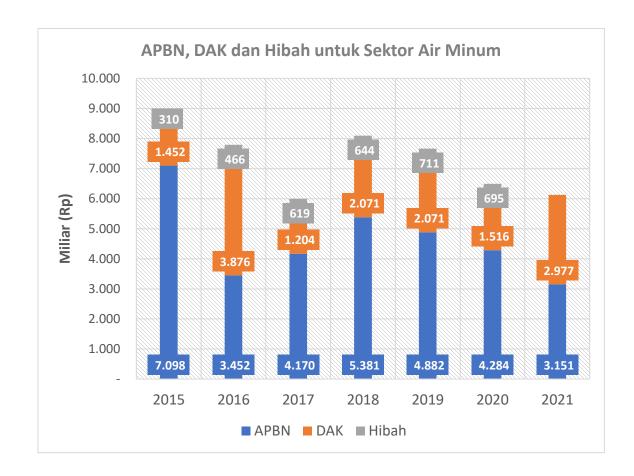
Sumber: Susenas KOR, 2021 diolah Bappenas Direktorat Perumahan dan Permukiman

Investasi APBN untuk Air Minum 2015-2021

ALOKASI DAN REALISASI APBN

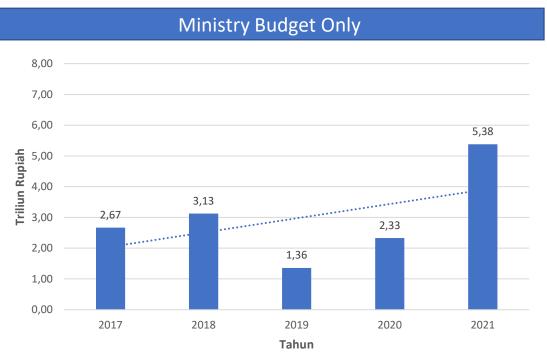


Sumber: LAKIP DJCK dan Susenas BPS (2015-2020)

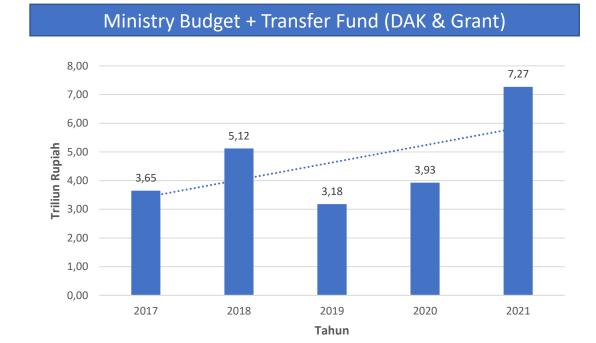


- Alokasi APBN sektor air minum mengalami peningkatan mulai dari tahun 2016-2019. Rata-rata realisasi APBN dari total alokasi pagu per tahun adalah
 80%. Namun, jika dilihat proporsi investasi APBN per kapita untuk sektor air minum masih rendah, rata-rata hanya Rp 15.350 per kapita.
- Alokasi APBN jika ditambah dengan sumber pendaan DAK dan Hibah mengalami peningkatan yang fluktuatif dikarenakan dana perbedaan DAK dan Hibah yang berbeda beda setiap tahunnya.
- Rata-rata total pendanaan sektora air minum adalah pertahun adalah Rp 6.7 T dengan total tertinggi pada 2016-2021 terjadi di tahun 2018 yaitu Rp7.4 T
- Namun, jika dilihat **proporsi investasi APBN, DAK dan Hibah per kapita** untuk sektor air minum masih rendah, **rata-rata hanya Rp 27.665 per kapita**.
 Direktorat Perumahan dan Permukiman

Investasi APBN untuk Sanitasi 2017-2021



Year	Investment (IDR)
2017	2,669,241,538,000
2018	3,127,540,598,000
2019	1,356,391,904,000
2020	2,328,539,000,000
2021	5,378,756,917,000



Year	Investment (IDR)
2017	3,649,525,042,548
2018	5,119,956,795,816
2019	3,182,852,289,736
2020	3,928,325,519,571
2021	7,268,594,917,000

Direktorat Perumahan dan Permukiman



TERIMA KASIH

Ministry of National Development Planning/ National Development Planning Agency

> Jalan Taman Suropati No. 2, Jakarta 10310 021 3193 6207 bappenas.go.id



LANGKAH PENERAPAN MAM DI INDONESIA



Komitmen milik bersama yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dan terdapat timeline yang jelas (time-bound actions)-SMART.

Perkembangan atas komitmen

akan dinilai dan didiskusikan secara berkala melalui proses multi-stakeholder yang dipimpin oleh pemerintah atau pihak lain.

Pemerintah dan para pemangku kepentingan berkolaborasi dalam menentukan komitmen MAM nasional.



Selain itu, ketika komitmen tidak terpenuhi, harus ada untuk dapat ruang mengidentifikasi tindakan **perbaikan** dan penyesuaian yang diperlukan.

> Proses perencanaan dan review harus didokumentasikan secara jelas dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan sektor.